

Menceburkan Diri, Seorang Pria Hilang di Danau Lagoon

BEKASI (IM) - Seorang pria tanpa identitas dinyatakan hilang di danau kawasan Apartemen Grand Kamala Lagoon, Bekasi Selatan, Rabu (12/4) malam. Koordinator Unit SAR Bekasi, Rizky Dwianto mengatakan, pihaknya masih mencari keberadaan pria tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan saksi yang melihat kejadian tersebut dan tim gabungan saat ini tengah mencari pria yang dikabarkan tenggelam tersebut," kata Rizky di Bekasi, Kamis (13/4).

Rizky mengungkapkan, pria tersebut disebut sengaja menceburkan diri ke danau. Informasi itu didapat dari petugas sekuriti yang berjaga di sekitar tempat kejadian. Mengetahui hal tersebut, petugas sekuriti itu langsung memanggil tim SAR

gabungan untuk mencari korban.

Rizky menuturkan, pencarian tubuh korban saat ini dibagi menjadi tiga area. "Tim pertama akan mencari menggunakan perahu karet menyusur danau di sekitar lokasi kejadian," tutur dia.

Tim kedua mencari berdasarkan visual melalui jalur darat di sekitar danau. Sementara itu, tim ketiga akan mencari menggunakan alat pendeteksi bawah permukaan air, yaitu *aqua eye* dan *underwater searching device*.

"Hingga Kamis pagi, ada puluhan personel SAR gabungan dikerahkan dalam upaya pencarian korban. Personel gabungan ini antara lain Unit Siaga SAR Bekasi, Polres Metro Bekasi, BPBD Kota Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi, dan sejumlah relawan lainnya," kata Rizky. • yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



BAZAR TNI DI CILANGKAP

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) bersama KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo (kiri) dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (kedua kiri) meninjau stan saat Bazar TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (13/4). TNI menggelar Bazar TNI dalam rangka Idul Fitri 1444 H yang diikuti 305 stan pada 13-14 April 2023.

MASIH BANYAK PEMILIK MOBIL TAK PUNYA GARASI

Pemprov DKI Diusulkan Punya Parkir Komunal

JAKARTA (IM) - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengatakan, setidaknya ada tiga solusi soal masalah kepemilikan garasi bagi pemilik mobil di Jakarta. Solusi ini, kata dia, untuk menekan penyalahgunaan fasilitas umum yang dijadikan lokasi parkir.

Nirwono mencontohkan, perlu ada pemanfaatan lahan resmi untuk fasilitas parkir komunal di lingkungan padat penduduk.

"Jadi semangatnya bukan untuk memberi sanksi, tetapi memberi kesadaran bersama bagi warga tentang kewajiban menyediakan garasi sehingga tidak parkir permanen di jalan lingkungan atau gang," kata Nirwono

dalam garasi atau tempat parkir resmi akan membantu memperlancar arus kendaraan.

Dengan demikian, tak ada lagi pergerakan kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans yang terhambat jika terjadi kebakaran di permukiman padat. Selain itu, ujar Nirwono, kepemilikan garasi juga untuk mencegah terjadinya konflik sosial antartetangga.

Pasalnya, sebanyak 45 persen permukiman di Jakarta merupakan permukiman padat atau hunian tapak dengan jalan lingkungan sempit sampai ke gang-gang. Selain itu, sebanyak 75-80 persen kebakaran sering kali terjadi di kawasan permukiman padat, dan 80 persen kendaraan pemadam kebakaran terlambat atau tidak bisa mencapai lokasi kebakaran karena terhambat.

Nirwono menambahkan, kewajiban pemilik kendaraan memiliki garasi dapat diutamakan di permukiman padat dengan jalan lingkungan sempit.

Selain itu, gang-gang harus bebas dari parkir kendaraan bermotor untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas jika terjadi bencana kebakaran.

"Ini menjadi krusial untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas, terutama ketika terjadi bencana kebakaran, serta mencegah terjadinya konflik sosial antartetangga," ujar Nirwono.

"Sebaiknya penataan ini bisa dimulai dari jalan lingkungan sempit dan gang-gang di permukiman padat," kata dia. • yan

796 Pejabat Dirotasi, Sekda DKI Klaim Ingin Ada Inovasi Baru

Rotasi ini dilakukan untuk percepatan pembangunan Kota Jakarta dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus pendorong bagi peningkatan kerja aparatur Pemprov DKI. Selepas kota Jakarta tidak lagi menyangand status Ibu Kota Negara, Jakarta harus tetap menjadi representasi dan cerminan miniatur keberagaman NKRI.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono melantik 796 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelantikan itu berlangsung

di halaman Balai Kota Jakarta, pada Rabu (12/4) sore. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pejabat pengawas ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sekda DKI, Joko mengatakan, pelaksanaan rotasi atau perpindahan tugas dalam jabatan struktural merupakan dinamika serta kebutuhan untuk mendukung kinerja organisasi yang baik. Upaya ini dilakukan untuk percepatan pembangunan Kota Jakarta dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus pendorong bagi peningkatan kerja aparatur Pemprov DKI.

"Kita ingin ada inovasi-inovasi baru, seperti mereka harus berpikir bagaimana memajukan DKI Jakarta ini dapat transparan dalam pengelolaan anggaran. Lalu, dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," kata Joko dalam keterangannya dikutip, Kamis (13/4).

Ia menambahkan pelantikan ini juga bertujuan mewujudkan good governance yang berbasis transparansi, akuntabilitas dan integritas, serta berorientasi pada pelayanan. Hal ini perlu dilakukan lantaran banyaknya tugas yang harus dikerjakan di tengah upaya pemulihan ekonomi, pembangunan pasca-pandemi, serta masa transisi pemindahan Ibu Kota Negara.

"Tentu, kita semua berharap, ini dapat meningkatkan sinergi antartim dan mampu memberikan kontribusi positif untuk kemajuan pembangunan kota Jakarta. Selepas kota Jakarta tidak lagi menyangand status Ibu Kota Negara, Jakarta harus tetap menjadi representasi dan cerminan miniatur keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan

dampak positif bagi daerah lain di Indonesia," ucapnya.

Joko meminta para pejabat yang memperoleh kepercayaan untuk selalu siap siaga, berdaya saing, transparan, akuntabel, dan profesional, terutama bagi mereka yang melayani masyarakat secara langsung. Sebab, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang andal, penuh dedikasi dan memiliki integritas tinggi dalam mendorong komitmen tersebut.

"Mari kita tanamkan rasa optimisme bersama untuk mewujudkan Jakarta yang maju dan sejahtera, menjaga persatuan dan kesatuan kebersamaan dalam suasana kebhinekaan dan toleransi yang tinggi. Sekali lagi, saya ucapkan selamat mengemban amanah baru dan selamat bertugas," tuturnya. • yan

PUPR Jadikan Bendungan Sukamahi Objek Wisata Berbasis Lingkungan

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo telah meresmikan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 23 Desember 2022 lalu. Bendungan ini tak hanya digunakan untuk meredam potensi banjir di DKI Jakarta, namun bermanfaat sebagai objek wisata.

Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widoyo mengatakan pihaknya memanfaatkan potensi sumber daya alam di sekitar Bendungan

Sukamahi dengan penataan. Nantinya, bendungan tersebut akan menjadi lokasi wisata edukasi lingkungan yang terbuka untuk masyarakat.

Sebelumnya, kawasan Bendungan Sukamahi merupakan areal pembuangan material sisa pembangunan. Namun Kementerian PUPR mengubah kondisi wilayah itu.

"Sesuai arahan Menteri PUPR, lahan ini ditata menjadi rumah hidroponik," kata Jarot.

Bendungan Sukamahi

dibangun pada 2016 hingga 2022 dengan konsep bendungan kering. Bendungan ini memiliki kapasitas 1,7 juta m3 dan berfungsi untuk menahan debit hujan di hulu Sungai Ciliwung. Dengan adanya Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, debit air yang keluar dapat dikendalikan hingga Bendung Katulampa.

Selain membangun dua bendungan, Kementerian PUPR juga menyelesaikan Sudetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur pada April 2023.

Normalisasi Sungai Ciliwung juga akan dilanjut demi mengurangi potensi banjir.

"Total pengurangan daerah terdampak risiko banjir dari pembangunan ketiga prasarana tersebut, yakni Bendungan Kering, Sudetan, dan Normalisasi Sungai Ciliwung adalah 347 hektare," kata Jarot.

Sedangkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan Bendungan Sukamahi akan menjadi pengembangan ekowisata ka-

wasan Puncak Bogor. PUPR juga akan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan.

Saat persesman, Presiden Joko Widodo menyebut Bendungan Sukamahi memiliki potensi wisata yang tinggi. Ini karena arsitektur bendungan sangat bagus untuk didatangi pengunjung.

"Baik Bendungan Ciawi dan Sukamahi, dua-duanya akan dipakai untuk wisata," kata Presiden. • yan

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 Desember 2022			LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022		
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS					
ASET LANCAR			LIABILITAS			PENJUALAN NETO		
Kas dan bank	1.982.728.868	12.756.061.463	LIABILITAS JANGKA PENDEK			971.541.518.082	843.195.153.685	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Pinjaman usaha - pihak ketiga - neto	20.570.322.056	22.363.508.086	Utang bank jangka pendek	125.000.000.000	125.000.000.000	944.244.905.030	761.001.765.843	Penerimaan kas dari pelanggan
Pinjaman lain-lain - pihak ketiga - neto	4.383.252.401	4.207.560.892	Utang usaha - pihak ketiga	112.759.787.874	80.649.011.788	27.296.613.852	82.193.387.842	Pembayaran kas kepada pemasok dan lain-lain
Persewaan	160.892.134.569	95.322.423.642	Utang muka penjualan	35.434.381.385	38.694.176.829	BEBAN USAHA	(21.406.878.725)	(18.819.559.173)
Asi biologis	29.973.543.137	57.709.328.746	Utang lain-lain - pihak ketiga	18.641.199.323	17.517.730.241	Beban penjualan	(35.307.779.904)	(33.860.160.521)
Utang muka dan biaya dibayar dimuka	36.436.706.925	27.359.702.490	Utang pajak	17.200.211.924	30.738.222.357	Beban umum dan administrasi	(57.334.658.629)	(52.679.739.694)
Pajak dibayar dimuka	8.254.899.516	2.756.116.644	Akumulasi Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	66.394.927.089	61.266.862.357	LABA (RUGI) USAHA	(30.038.045.577)	29.513.648.148
Total Aset Lancar	262.493.584.472	222.474.791.963	LIABILITAS JANGKA PANJANG			PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
ASET TIDAK LANCAR			Utang jangka panjang	279.309.068.594	227.853.621.127	Beban keuangan	(228.731.808.998)	(231.287.062.053)
Pluiting plasma	345.420.951.489	283.943.764.732	Utang bank	1.039.662.031	-	Penghasilan keuangan	70.594.837	93.131.978
Bibitan	14.730.266.078	14.910.933.685	Liabilitas sewa	655.779.238.220	581.719.424.699	Keuntungan (Kerugian) lain-lain - neto	(21.921.133.002)	12.240.820.210
Tanaman produktif			Total Liabilitas	655.779.238.220	581.719.424.699	Beban Lain-Lain - neto	(250.582.347.163)	(218.953.109.865)
Tanaman menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 531.270.122.407 tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 471.615.756.131 tanggal 31 Desember 2021	1.059.237.969.295	1.118.492.255.406	LIABILITAS JANGKA PANJANG			MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Tanaman belum menghasilkan	1.030.619.311.476	977.527.706.557	Utang jangka panjang - setelah dikurangi tagihan jatuh tempo dalam satu tahun	1.830.681.955.506	2.104.125.571.508	Pajak kini	(102.986.798)	(1.142.029.532)
Ases tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 551.011.298.723 tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 595.381.564.198 tanggal 31 Desember 2021	793.234.807.146	636.319.217.253	Pajak bea cukai	949.858.519.266	611.766.163.973	Pajak tangguhan	(21.089.317.164)	12.302.879.780
Utang muka perolehan aset	42.951.533.459	38.665.678.611	Liabilitas imbalan kerja	33.214.228.323	43.206.359.391	Manfaat (beban) Pajak Penghasilan - neto	(21.192.303.952)	11.160.850.248
Goodwill	17.979.322.415	17.979.322.415	Liabilitas pajak tangguhan	1.703.657.362	2.008.747.678	RUGI NETO TAHUN BERJALAN	(301.812.696.992)	(178.278.611.469)
Taksiran pengembalian pajak	8.727.758.769	33.177.783.765	Total Liabilitas Jangka Panjang	2.815.458.360.457	2.761.106.842.550	PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Aset pajak tangguhan	14.246.982.847	14.986.694.441	Total Liabilitas	3.471.237.598.677	3.342.826.267.249	Pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:		
Aset lain-lain	3.327.148.882.974	3.343.756.691.060	Ekuitas			Pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja	13.925.100.912	(131.836.879)
Total Aset Tidak Lancar	3.327.148.882.974	3.343.756.691.060	Ekuitas yang Dapat Ditransfer ke Pemilik Entitas Induk	377.468.550.000	377.468.550.000	Beban pajak tangguhan terkait	(3.055.617.520)	(89.444.524)
TOTAL ASET	3.589.642.467.446	3.566.231.393.023	Modal dasar - nilai nominal Rp 100 per saham	434.217.673.015	434.217.673.015	Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak	10.869.483.392	(221.281.403)
			Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.774.685.500 saham	607.715.845.571	410.974.726.970	TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(290.943.213.300)	(178.499.892.872)
			Saldo laba (defisit) dicadangkan	1.540.927.303	1.540.927.303	RUGI NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
			Belum dicadangkan	29.709.895.542	29.709.895.542	Pemilik entitas induk	(300.206.074.060)	(177.488.281.450)
			Ekuitas neto yang dapat ditribusikan kepada pemilik entitas induk	108.773.596.885	212.238.552.244	Kepentingan non pengendalian	(1.806.822.632)	(790.329.979)
			Kepentingan non pengendalian	9.631.271.884	11.166.573.530	Total	(301.812.696.992)	(178.278.611.469)
			TOTAL EKUITAS	118.404.868.769	223.405.125.774	TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.589.642.467.446	3.566.231.393.023	Pemilik entitas induk	(289.407.911.654)	(177.720.976.994)
						Kepentingan non pengendalian	(1.806.822.632)	(778.915.878)
						Total	(290.943.213.300)	(178.499.892.872)
						RUGI PER SAHAM - DASAR	(79,53)	(47,02)

Catatan:
1. Informasi Keuangan diatas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjayan, Mulyadi, Tjoho & Rekan (Member of Crowe Global) yang telah memberikan opini "Wajar dalam semua hal yang material" dalam laporannya tertanggal 12 April 2023
2. Informasi tertentu seperti catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian tidak termasuk dalam informasi yang disajikan diatas.